



Dessabank, Lembaga Keuangan Masa Pemerintah Hindia Belanda di Pedesaan Buleleng-Bali, Awal Abad XX

Dessabank, A Dutch Government-Era Banking Institution in Rural Buleleng-Bali in The Early XX Century

Ida Ayu Wirasmini Sidemen

Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Indonesia

email korespondensi: idaayuwirasmini@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 23 Maret 2024

Revisi: 16 Mei 2024

Diterima: 10 Juli 2024

Terbit: 31 Agustus 2024

Keywords: Dessabank; bank institution; village regulation

Kata kunci: Dessabank; lembaga keuangan; peraturan desa

Corresponding Author:

Ida Ayu Wirasmini Sidemen,
email:

idaayuwirasmini@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.24843/JH.2024.v28.i03.p06>

Abstract

The Dutch East Indies Government's view of traditional financial management was an early attempt by the government to establish a network of modern financial institutions in rural areas. The government introduced Dessabank as a modern financial institution whose operational task is under the supervision or guidance of central cash officers. Dessabank as a banking institution has to follow the system of rural financial management. The establishment of Dessabank Patemon in 1914 in Patemon Village, Pengastulan District, Buleleng, was responded by the villagers through village officials and utilized the regulations (awig-awig) of Patemon Village. The Dessabank in Banjar Buleleng utilized local administrative personnel and The Dutch East Indies government expected the Dessabank will function well and meet the needs of the village community. In the villages where a Dessabank has been successfully established, there were successful stories such as; the setting of interest rates, the obligation to repay the loan principal, the introduction of the difference in the number of days between the Saka year and the Gregorian year, and the involvement of villagers as bank employees.

Abstrak

Pandangan Pemerintah Hindia Belanda terhadap pengelolaan keuangan tradisional, sebagai usaha awal pemerintah untuk membangun jaringan lembaga keuangan modern di pedesaan. Pemerintah Hindia Belanda, mengenalkan Dessabank sebagai sebuah lembaga keuangan modern yang dalam tugas operasionalnya berada di bawah pengawasan atau pembinaan pegawai central kas. Agar Dessabank sebagai lembaga keuangan dapat diterima oleh masyarakat desa, maka Dessabank bergerak mengikuti sistem dan cara-cara pengelolaan keuangan pedesaan. Pendirian Dessabank Patemon tahun 1914 di Desa Patemon Distrik Pengastulan Buleleng, direpons oleh warga desa melalui pejabat desa dan memanfaatkan atau mengikuti peraturan (awig-awig) Desa Patemon. Dessabank di Banjar Buleleng, menggunakan tenaga administrasi masyarakat lokal. Pemerintah Hindia Belanda berharap bahwa Dessabank berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pada desa-desa yang telah

berhasil didirikan Dessabank, tampak keberhasilan antara lain dalam penetapan suku bunga, kewajiban mengangsur pokok pinjaman, pengenalan perbedaan jumlah hari antara tahun Saka dengan tahun Masehi, serta melibatkan orang desa sebagai karyawan bank.

PENDAHULUAN

Pandangan dan kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pengelolaan keuangan tradisional di pedesaan di Buleleng dapat diketahui melalui memori serah terima jabatan dari para pejabat pemerintah Hindia Belanda yang pernah ditugaskan di wilayah Bali, baik residen, asisten residen maupun kontrolir. Laporan tertulis para pejabat Hindia Belanda pada umumnya memuat deskripsi tentang seluk beluk penduduk desa dan kehidupannya. Laporan ini dapat dianggap mewakili pandangan, pendapat dan kebijakan pemerintah Hindia Belanda.

Selain yang dikerjakan oleh pejabat pemerintah, laporan yang dikerjakan oleh para penulis perorangan Belanda, antara lain C.J Carron; Beeuurkes. Terutama tentang laporan yang berkaitan dengan keadaan sosial ekonomi desa, juga dapat dianggap sebagai mewakili pandangan dan pendapat pemerintah Hindia Belanda tentang pengelolaan keuangan pedesaan Bali. (Memorie van Overgave van het Gewest Bali Lombok 1 April 1919: 76-82; Carron, 1929 :60-78; Beeuurkes, 1932: 128-140).

Pandangan pemerintah Hindia Belanda terhadap pengelolaan keuangan tradisional, sebagai usaha awal pemerintah untuk membangun jaringan lembaga keuangan modern di pedesaan. Pemerintah berharap lembaga keuangan modern dapat diterima oleh masyarakat desa. Pemerintah Hindia Belanda menyatakan bahwa pengelolaan keuangan bukan hal yang baru bagi masyarakat pedesaan di Bali. Menurutnya, pengelolaan keuangan di pedesaan di Bali, khususnya di Buleleng secara struktur organisasi yang bersifat komunal yang diselenggarakan oleh desa atau banjar dan operasionalnya dianggap sudah bergerak secara melembaga, yang didasarkan atas peraturan desa dan peraturan (paswara) kerajaan. Keberadaan lembaga pengelolaan keuangan, dapat diakui sebagai salah satu komponen yang menyelenggarakan keuangan pedesaan. (Carron, 1929: 66)

Pemerintah Hindia Belanda, mengenalkan Dessabank sebagai sebuah lembaga keuangan modern. Agar Dessabank sebagai lembaga keuangan dapat diterima oleh masyarakat desa, maka Dessabank bergerak mengikuti sistem dan cara-cara pengelolaan keuangan pedesaan. Ruang lingkup operasionalnya dalam lingkup desa. Sistem operasional Dessabank tidak terlalu jauh berbeda dengan sistem pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh desa dan banjar. (Beeuurkes, 1932: 132). Lembaga perkreditan memandang dessabank sebagai ujung pelaksanaan kredit yang dilakukan secara bertahap. (Boeke, 1929: 440).

Dalam artikel ini dibahas mengenai pendirian Dessabank di pedesaan Buleleng serta aktivitas yang dijalankan oleh Dessabank sebagai sebuah lembaga keuangan.

METODE DAN TEORI

Metode karya tulis ini menggunakan metode sejarah yang diaplikasikan sebagai perangkat kerja dalam usaha menemukan sumber (heuristik). Sumber-sumber tersebut diperoleh dari menilai otentisitas dan kredibilitas Berikutnya interpretasi terhadap sumber dan penulisan sejarah sebagai hasil penelitian (historiografi). (Garraghan, 1957: 33; Gottschalk, 1975: 80-95). Sumber-sumber primer yang digunakan antara lain Memorie

van Overgave oleh beberapa orang controleur, yang isinya tentang naskah serah terima ketika terjadi pergantian pejabat dalam pergantian pejabat pemerintahan Hindia Belanda, merupakan yang terpenting yang ditemukan di Arsip Nasional RI di Jakarta. Sumber berupa *Memorie van Overgave* memberikan informasi mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti, ekonomi, budaya, adat.

Teori yang digunakan adalah teori sejarah. Ada lima teori sejarah yaitu pemahaman sejarah; menjelaskan sejarah (eksplanasi sejarah); objektivitas sejarah; kausalitas sejarah dan determinisme sejarah. (Sidemen, 1991: 30-31, 37-40). Berkaitan dengan Dessabank sebagai sebuah lembaga keuangan, teori sejarah yang digunakan yaitu teori eksplanasi sejarah. Menjelaskan latar belakang pendirian Dessabank dan aktivitas beberapa Dessabank di beberapa desa di Buleleng.

Dessabank yang dibahas dalam karya tulis ini, merupakan bagian dari sejarah ekonomi sebagai bentuk dari lembaga keuangan modern Pemerintah Hindia Belanda. Menurut Peter Termin, sejarah ekonomi menganalisis pengaruh lembaga ekonomi terhadap ekonomi yang berjalan. Masalah-masalah pokok dalam sejarah ekonomi dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu masalah pertumbuhan ekonomi; lembaga ekonomi (perbankan atau lembaga keuangan); kebijakan pemerintah. (Peter Termin (ed.), 1973: 9-15). Menurut Kuntowijoyo, sejarah ekonomi membahas lembaga-lembaga ekonomi, seperti koperasi, lumbung desa dan bank. (Kuntowijoyo, 2003: 101). Iswardono, menjelaskan bahwa lembaga keuangan dalam bentuk bank, yaitu bank sentral, bank umum, bank tabungan, bank pembangunan dan bank-bank sekunder lainnya, yang didalamnya termasuk antara lain koperasi, lumbung desa, bank desa. (Iswardono, 1994: 54-55).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendirian Dessabank.

Dessabank yang dibentuk di tingkat lokal, memberikan pinjaman jangka pendek dalam jumlah kecil. (Creutberg dan Laanen, 1987: 351). Usaha pemerintah Hindia Belanda dalam pendirian dan pembangunan jaringan institusi keuangan modern hingga dapat menyentuh masyarakat pedesaan, maka pada tahun 1913 Dessabank mulai didirikan dan dikembangkan oleh pemerintah Hindia Belanda di pedesaan Buleleng. Sejak berdiri hingga tahun 1918, telah berdiri 32 buah Dessabank. (Beeuurkes, 1932: 132). Dessabank tersebar di beberapa wilayah distrik seperti di wilayah Distrik Buleleng terdapat 5 buah, di wilayah Distrik Banjar terdapat 13 Dessabank, dan 14 Dessabank berada dalam wilayah Distrik Pengastulan. (*Jaarverslag over 1916 van de Boelelengsche Credietbank te Singaraja*: 5-6). Di Desa Patemon Distrik Banjar terdapat Dessabank bernama Dessabank Patemon dan menyebutkan ada pembubaran Dessabank untuk Desa Runuh yang termasuk Distrik Buleleng. (Carron, 1929: 64). Tahun 1918 berdiri 2 buah Dessabank dan tahun 1922 berdiri 22 dessabank. (*Memorie van overgave van den Resident van Bali en Lombok, Augustus 1929*: 64). Selama 10 tahun, dari 137 desa yang ada di swapraja Buleleng, baru berhasil berdiri 45 dessabank, atau sekitar 32%.

Modal kerja Dessabank berasal dari iuran wajib atau saham anggota atau warga desa yang diserahkan kepada desa atau banjar, sehingga menjadi kas desa atau kas banjar. (Carron, 1929: 71). Selain itu, modal kerja Dessabank berasal dari pinjaman yang diperoleh dari Volksbank. Dessabank berstatus dan berperan sebagai lembaga

keuangan milik desa, sedangkan Volksbank berstatus dan berperan sebagai lembaga keuangan pemerintah. (Carron, 1929: 71).

Agar Dessabank sebagai lembaga keuangan dapat diterima oleh masyarakat desa, maka Dessabank bergerak mengikuti sistem dan cara-cara pengelolaan keuangan pedesaan. Ruang lingkup operasionalnya dalam lingkup desa. Sistem operasional Dessabank tidak terlalu jauh berbeda dengan sistem pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh desa dan banjar. (Beeurkes, 1932: 132).

Dessabank diperkenalkan dan dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam tahun 1913, dan mulai didirikan di Buleleng. Pada awal berdirinya, Dessabank bergerak mengikuti sistem dan cara-cara pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh lembaga kredit tradisional pedesaan. Ruang lingkup operasionalnya dalam lingkup desa, banjar, atau sekeha. Sistem operasional Dessabank dapat dikatakan tidak terlalu jauh berbeda dengan sistem perkreditan yang diselenggarakan oleh banjar atau sekeha-sekeha itu. (Beeurkes, 1932: 132). Belum ditemukan sumber yang menyebutkan nama desa di Buleleng tempat pertama kali didirikan Dessabank. Dapat diduga Dessabank didirikan dekat ibukota residen Bali-Lombok, seperti Pabean (kampung Cina), perkampungan Jawa (Bugis, Madura).

B. Aktivitas Dessabank

Dana yang dipinjamkan kepada anggota berasal dari iuran dan tabungan yang dibayarkan oleh anggota ketika memulai rapat atau pertemuan. (Oldenborgh, 1932: 785). Melalui organisasi desa atau banjar, bunga pinjaman dari Dessabank berkisar 2% setiap bulan Bali (35 hari). (Carron, 1929: 71). Modal kerja Dessabank selain diperoleh dari Volksbank, juga berasal dari iuran wajib atau saham anggota yang diserahkan kepada desa atau banjar sehingga menjadi kas desa atau kas banjar. (Carron, 1929: 71). Hal itu sama dengan tabungan wajib (cingkrem) dan iuran wajib (peturunan) dalam sistem keuangan desa di Bali. Dengan demikian Dessabank akan berstatus dan berperan sebagai lembaga keuangan milik desa.

Perubahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan pedesaan, sebagai dampak dari berdirinya Dessabank adalah penurunan suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman sebelum berdirinya Dessabank, pada umumnya berkisar dari 3% sampai 5% sebulan (35 hari), atau 2,5% sampai 3,7% setiap bulan Masehi (30) hari. Operasional Dessabank menawarkan bunga pinjaman berkisar dari 1% sampai 2% setiap bulan (30 hari). (Beeurkes, 1932: 132; Boeke, 1919:56). Suku bunga Dessabank rata-rata setahun 24%. (Sulistyardhani, 2000: 45).

Dalam menetapkan besarnya suku bunga pinjaman, Dessabank hanya menetapkan bunga maksimal 18% setahun. Secara bertahap Dessabank berusaha menetapkan suku bunga hingga berada di bawah 12% setahun. Pengaruh penurunan suku bunga ini tampak setelah Dessabank berjalan hampir dua puluh tahun.

Selain itu, Dessabank telah memperkenalkan sistem jangka waktu pinjaman yang pasti dengan kewajiban membayar pokok pinjaman beserta bunganya secara mengangsur. Para peminjam mulai diwajibkan mengangsur pokok pinjaman sehingga besarnya bunga yang harus dibayar oleh peminjam dapat menjadi semakin kecil. Dalam hal menindak peminjam yang cedera janji, maka Dessabank dapat melakukan tindakan mengacu kepada peraturan (awig-awig), terutama di wilayah desa-desa yang adat istiadatnya kuat. (Beeurkes, 1932: 136-137).

Dalam hal kebiasaan menabung, Dessabank belum berhasil menyerap dana masyarakat desa secara efektif. Hingga tahun 1920-an, Dessabank dianggap belum

mampu mengarahkan masyarakat pedesaan agar mereka mulai membiasakan diri untuk menabung di bank. Masyarakat desa di Buleleng dianggap belum sepenuhnya dapat membiasakan diri menabung secara tunai di bank. (Beeurkes, 1932: 136-137). Dapat diduga menabung masih dilakukan dalam celengan, menabung dengan cara membeli emas atau perhiasan, atau dengan cara memelihara ternak babi dan sapi. Asumsinya, menunjukkan cara-cara menabung sistem perbankan yang diterapkan oleh Dessabank baru mampu dikenal dan dimengerti oleh penduduk tepian kota serta sebagian kecil elit pedesaan yang sering berhubungan dengan pejabat Pemerintah Hindia Belanda. Tampaknya tradisi pengelolaan keuangan sangat kuat mengakar dalam masyarakat desa, sehingga Dessabank yang jumlah kantornya masih sedikit, dianggap belum mampu mengubah sistem yang ada secara cepat, seperti yang diinginkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Perubahan sebagai dampak operasional Dessabank ditemukan pada masyarakat desa tepian kota, terutama desa-desa di sekitar kota Singaraja atau yang termasuk Distrik Buleleng. Pemerintah Hindia Belanda telah berusaha secara intensif membuka kantor Dessabank pada beberapa desa di Buleleng. Walaupun hasil dari yang diharapkan baru sebatas membuka kantor Dessabank. Tampaknya pemerintah Hindia Belanda di Singaraja berusaha melakukan pendirian dan pembangunan jaringan lembaga keuangan modern Hindia Belanda agar lebih mudah direspons secara positif oleh masyarakat pedesaan.

Sebagai perbandingan, pendirian Dessabank atas usul dari bawah yaitu pendirian Dessabank di Desa Ngasem, Kecamatan Colo Madu, Distrik Kampung Lor Surakarta. Mantri Gunung Colo Madu dalam surat yang ditujukan kepada pemerintah Mangkunegaran bahwa ingin mendirikan Dessabank dan telah memiliki modal f 200 yang berasal dari kas desa. Usul ini telah disetujui oleh kepala kelurahan dan masyarakat, karena di wilayah itu banyak pedagang kecil. (Wasino, 2010: 266-267).

Menurut Sumitro Djojohadikusumo, dalam usaha pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan mendirikan Dessabank sebagai sebuah lembaga keuangan dapat diterima oleh masyarakat desa, maka aktivitasnya diusahakan tetap melibatkan pejabat desa dan masyarakat desa beserta aturan desanya. Tujuannya agar Dessabank dapat diterima sebagai sebuah lembaga desa yang memberikan pinjaman di desa. Terutama Dessabank di Bali Utara, pengelolaan Dessabank diserahkan kepada desa dalam ikatan desa dan menjadi urusan internal desa. (Sumitro Djojohadikusumo, 1989: 238).

Sebagai lembaga keuangan, Dessabank dipimpin oleh dua orang mantri bank, yang dalam tugas operasionalnya berada di bawah pengawasan atau pembinaan pegawai central kas. Tugas para pegawai Central Kas antara lain seperti: (1) membuat verifikasi administrasi terhadap kantor pusat Balische Volksbank di Singaraja dan kantor pembantunya di Denpasar, Mataram, dan Karangasem; (2) melakukan pengawasan terhadap para mantri bank yang ditugaskan oleh Central Kas di wilayah Bali Utara dan Bali Selatan dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap Dessabank serta Balische Volksbank dalam wilayah onderafdeeling; (3) membentuk atau mendirikan kantor pembantu Balische Volksbank di Tabanan yang mewilayahi Distrik Tabanan, Kerambitan, dan Marga; (4) membentuk Balische Volksbank di daerah onderafdeeling Karangasem, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan mendirikan kantor Balische Volksbank di onderafdeeling Klungkung, Gianyar, Badung, dan Jembrana. Untuk tugas ini Central Kas harus mengadakan penelitian kelayakan terhadap kemungkinan itu. (5) mengadakan penelitian kelayakan di onderafdeeling Lombok untuk melihat adanya kemungkinan mendirikan Balische Volksbank di wilayah onderafdeeling Lombok

Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. (Carron, 1929: 75-77). Pengurus (pejabat) central kas, berwenang mengatur seluruh bank. (Gonggrijp, 1929: 87)

Pihak pemerintah juga mulai memperkerjakan penduduk desa sebagai karyawan Dessabank dengan mengangkat seorang warga desa sebagai juru tulis Dessabank. Kepala desa juga dimasukkan dalam kepengurusan Dessabank, sehingga ketika ada warga desanya meminjam, maka Dessabank dapat menaksir kemampuan peminjam. (Sulistyardhani, 2000: 45). Berikutnya, diuraikan mengenai aktivitas beberapa Dessabank di Buleleng.

Usaha pemerintah yang telah dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, agar lembaga keuangan modern dapat diterima oleh masyarakat desa, adalah pendirian Dessabank Patemon di Desa Patemon Distrik Pengastulan Buleleng. Pendirian Dessabank Patemon direspons oleh warga desa melalui pejabat desa dan memanfaatkan atau mengikuti peraturan (awig-awig) Desa Patemon. Masyarakat desa menganggap bahwa Dessabank merupakan milik desa. (Hunger, Oktober 1933-April 1935: I-III).

Pembukaan Dessabank Patemon dilakukan pada tanggal 12 Juni 1934, dihadiri oleh kontrolir Buleleng, kontrolir Sentral Kas, punggawa Distrik Pengastulan, klian desa, perbekel dan krama desa Patemon. (Hunger, Oktober 1933-April 1935: I-III). Seremoni pembukaan kantor Dessabank Patemon menunjukkan sebuah usaha pemerintah Hindia Belanda menampilkan peranan pejabat desa sebagai inovator bagi penduduk desanya sendiri.

Aktivitas Dessabank Patemon mengacu, menyesuaikan dan memanfaatkan peraturan desa. Di dalam peraturan desa, antara lain diatur mengenai bunga pinjaman, sistem pembayaran pinjaman, denda atau sanksi bagi peminjam yang tidak membayar pinjamannya serta lelang terhadap jaminan. Dalam salah satu futsal dalam awig-awig Desa Patemon yaitu penetapan suku bunga pinjaman. Setiap pinjaman sebesar 1 ringgit dikenakan bunga f 0,05 (lima sen), atau sebesar 2% dibayar setiap rapat (sangkepan) atau setiap 35 hari (bulan Bali) di balai desa Patemon. Pinjaman juga disertai dengan jaminan berupa barang atau benda. Penilaian atas kelayakan nilai jaminan terhadap besarnya pinjaman dilakukan oleh pejabat desa yang diberi nama oleh pemerintah Hindia Belanda dengan lid commissie. Lid commissie terdiri atas klian desa Patemon, perbekel Wesia Patemon, perbekel Kawula Patemon, perbekel Brahmana Patemon. Pada saat pengesahan berdirinya Dessabank Patemon, disebutkan sebagai klian desa bernama Sukarta, sebagai perbekel Brahmana bernama Ida Bagus Gde, perbekel Wesia bernama Gusti Putu Mataram, dan perbekel Kawula bernama I Nengah Wide. Klian desa merupakan jabatan kepala untuk seluruh rakyat desa. Perbekel wesia, merupakan kepala perwakilan keturunan wesia. (Hunger, Oktober 1933-April 1935: I-III). Dalam hal sistem administrasi, secara bertahap diusahakan menerapkan sistem administrasi perbankan modern, walaupun tetap menemui kesulitan dalam penggunaan bulan dan tahun, karena terjadi selisih hari, rata-rata 55 hari dalam satu tahun.

Dessabank Patemon mengenalkan pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya dicicil setiap rapat (sangkepan) dan harus sudah lunas selama 10 kali angsuran. Jika pada bulan pertama tidak dibayar, maka pada bulan kedua dibayar 2 kali. Apabila pada bulan pertama tidak membayar, maka bulan kedua berikutnya pembayaran dilakukan dua kali lipat ditambah dengan bunganya. Jika pada bulan kedua tidak dilakukan pembayaran, maka barang-barang yang dijadikan jaminan dijual lelang. (Hunger, Oktober 1933-April 1935: I-III).

Dalam hal pelelangan jaminan, Dessabank Patemon masih mengikuti peraturan (awig-awig) desa. Dalam pelaksanaan lelang, apabila terjadi kelebihan hasil lelang dari

jumlah utang beserta bunga dan dendanya, maka kelebihan dikembalikan kepada debitur. Apabila hasil lelang lebih kecil dari besarnya jumlah utang ditambah bunga dan denda, maka Dessabank berhak menjual harta yang lainnya, sampai hasilnya mencukupi. Selanjutnya, jika hasilnya masih juga kurang dan tidak menutupi besarnya pinjaman, maka kepada debitur dikenakan sanksi dengan melakukan kerja wajib (ayahan desa) dengan status pekerja desa (panjak desa). Setiap satu kali kerja wajib dinilai sebesar 25 sen. Debitur harus melakukan pekerjaan sebagai pekerja desa, sampai hasilnya dinilai oleh Dessabank telah melunasi seluruh utangnya. . (Hunger, Oktober 1933-April 1935: I-III).

Mengenai sanksi serta tindakan terhadap debitur macet, juga berlaku pada tahun 1930-an di Desa Kalopaksa, Desa Banjar Brahmana dan Desa Tista. Di Desa Kalopaksa, termasuk wilayah Distrik Buleleng, bagi debitur yang terlambat membayar bunga pinjaman selama 5 minggu (35 hari), maka bunga pinjaman pada bulan berikutnya (35 hari berikutnya) dilipatgandakan dua kali (nikel). Bunga yang sudah dilipatgandakan ini harus dibayar pada hari rapat (sangkepan) berikutnya (35 hari berikutnya). (Oldenborgh, 1932: 790-791). Dengan kalimat lain, pada bulan berikut atau 35 hari berikutnya, dan ketika ditetapkan sebagai debitur cedera janji, maka debitur harus membayar bunga dua kali lipat dari bunga yang rutin dibayarnya.

Di Desa Banjar Brahmana, termasuk Distrik Banjar, berlaku aturan pembayaran bunga pinjaman sebagai berikut. Untuk setiap pinjaman 1 ringgit (rijksdaalder), bunga pinjaman harus dibayar sebesar 10 sen (cent) setiap bulan Bali (35 hari), atau sama dengan 4% setiap bulan Bali, atau 3,4% setiap bulan Masehi (30 hari). Jika satu kali terlambat membayar bunga, maka pada bulan berikutnya (35 hari berikutnya), bunga yang harus dibayar oleh debitur bersangkutan adalah 30 sen, untuk setiap 1 ringgit (rijksdaalder). (Oldenborgh, 1932: 790-791). Dengan kalimat lain bahwa keterlambatan pertama denda yang harus dibayar pada bulan berikutnya adalah tiga kali lipat. Apabila pada bulan yang telah ditetapkan, debitur bersangkutan juga tidak membayar bunga pinjaman beserta dendanya, maka pada bulan berikutnya (bulan ketiga) bunga yang harus dibayar adalah 50 sen (cent) untuk setiap 1 ringgit (rijksdaalder), atau sama dengan 20%. Pada keterlambatan yang ketiga, bunga yang harus dibayar pada bulan berikutnya (bulan keempat) adalah sebesar 70 sen (cent) untuk pinjaman 1 ringgit (rijksdaalder), atau sama dengan 28%. Apabila pada saat harus membayar bunga 28% itu debitur bersangkutan tetap juga membangkang, lalu dilakukan lelang terhadap jaminan senilai pokok pinjaman beserta bunga 28% seperti tersebut di atas.

Di Desa Bungkulun termasuk Distrik Sawan, apabila ada peminjam terlambat satu kali membayar pinjamannya, maka bunganya akan dilipatgandakan 100%. Di desa Tista termasuk wilayah Distrik Buleleng, khususnya di Banjar Ngis, peminjam yang cedera janji diberikan kesempatan hingga 5 kali sangkepan (5x 35 hari) untuk membayar pinjaman beserta bunganya. Pada rapat atau pertemuan bulan keenam, jika sejak awal debitur tidak membayar bunga pinjamannya, maka debitur diharuskan membayar bunga pinjamannya dua kali lipat (nikel). Denda dalam bentuk nikel akan dikenakan setelah debitur telah tiga kali berturut-turut cedera janji. Apabila tidak juga membayar, maka dilakukan lelang terhadap jaminan senilai pokok pinjaman ditambah bunga yang telah dilipatgandakan. Walaupun telah dilakukan lelang jaminan, namun tidak juga menutupi pinjamannya maka harus ditambah dengan harta benda lainnya yang ada di rumah milik debitur. (Oldenborgh, 1932: 790-791).

Dessabank di Banjar Buleleng, menggunakan tenaga administrasi masyarakat lokal. dalam aktivitasnya diawasi dan dilindungi melalui kepala desa. Pemerintah kolonial

berharap bahwa Dessabank berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. (Grader, 1936: 38).

Data di atas menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di desa secara melembaga, dengan jelas disebutkan sanksi kalau terjadi keterlambatan membayar, terjadi sama hampir di semua desa. Hanya besar denda secara kuantitatif yang beragam. Munculnya keberagaman tergantung pada tradisi atau kebiasaan yang berlaku dari generasi ke generasi. Tampak pemerintah Hindia Belanda tidak terlalu turut campur. Walaupun alat transaksi yang digunakan adalah uang kartal terbitan pemerintah Hindia Belanda, aturan tentang denda pinjam meminjam terus berlangsung secara tradisi.

SIMPULAN

Pemerintah Hindia Belanda secara intensif mengenalkan lembaga keuangan modern dengan mendirikan Dessabank di pedesaan Buleleng. Dalam aktivitasnya, Dessabank mengacu, menyesuaikan dan memanfaatkan peraturan desa, antara lain diatur mengenai bunga pinjaman, sistem pembayaran pinjaman, denda atau sanksi bagi peminjam yang tidak membayar pinjamannya serta lelang terhadap jaminan. Pemerintah Hindia Belanda berharap agar Dessabank juga dapat memperkenalkan kepada masyarakat secara bertahap tentang pinjaman akan lebih bermanfaat bila digunakan sebagai modal berdagang atau modal untuk membeli bibit ternak. Pada desa-desa yang telah berhasil didirikan Dessabank, tampak keberhasilan antara lain dalam penetapan suku bunga, kewajiban mengangsur pokok pinjaman, pengenalan perbedaan jumlah hari antara tahun Saka dengan tahun Masehi, serta melibatkan orang desa sebagai karyawan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Beeuurkes. (1932). *Memorie van Overgave van den Resident van Bali en Lombok*.
- Boeke, J.H. (1919). "Pandcrediet als kleincrediet". *Koloniale Studien*. We.tevreden: Albrecht & co.
- Boeke, J.H. (1929). "Indonesische Volksbanken". *Koloniale Studien*. Dertiende Jaargang. Tijdschrift van de Vereeniging voor Studie van Koloniaal-Maatschappelijke Vraagstukken.
- Carron, C.J. (Augustus 1929). *Memorie van Overgave van den Resident Bali en Lombok*.
- Creutberg, Pieter dan J.T.M van Laanen (penyunting). (1987). *Sejarah Statistik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Djojohadikusumo, Sumitro. (1989). *Kredit Rakyat di Masa Depresi*. Jakarta: LP3ES.
- Garraghan, G.J. S.J. (1957). *A Guide of Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Gonggrijp, G. (1929). "De Reorganisatie der Volkscredietbanken". *Koloniaal Tijdschrift*. Achttiende Jaargang. Uitgegeven door de Vereeniging van Ambtenaren bij Het Binnelandsch Bestuur in Nederlandch-Indie.
- Gottschalk, Louis. (1975). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Yayasan UI.
- Grader. C. J. (1936). *Nota van Toelichtingen Betreffende het in te Stollen Zelfbesturend Landschap Boeileleng..*
- Hunger, F.W.T. (Oktober 1933-April 1935). *Memorie van Overgave van Onderafdeeling Boeileleng*.
- Iswardono. (1994). *Uang dan Bank*. Yogyakarta: BPFE.
- Jaarverslag over 1916 van de Boeilelengsche Credietbank te Singaraja*.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

- Memorie van Overgave het Gewest Bali en Lombok*, 1 April 1919.
- Memorie van Overgave van den Resident van Bali en Lombok*, Agustus 1929.
- Oldenborgh, L.C. van. "Eenige Aanteekeningen Omtrent het Crediet op Bali", *Volkscredietwezen*, 20e Jaargang, 1932.
- Sidemen, Ida Bagus. (1991). "Lima Masalah Pokok dalam Teori Sejarah". *Widya Pustaka*. Tahun VIII. Nomor 2. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Sulistyardhani, MG. (2000). *Kredit Rakyat: Suatu Studi Pendahuluan Pada Awal Abad XX di Jawa*. Yogyakarta: Kalika.
- Termin, Peter (ed.). (1973). *New Economic History*. Middlesex: Penguin Books.
- Wasino. (2010). "Dari Pola Bagi Hasil Menjadi Pembayaran Bunga: Perkembangan Kredit Rakyat di Pedesaan Surakarta Pada Awal Hingga Pertengahan Abad ke-20". J. Thomas Lindblad dan Bambang Purwanto (ed.). *Merajut Ekonomi Indonesia: Essays in Honour of Thee Kian Wie*. Yogyakarta: Ombak.